

**RETRIBUSI - IZIN KELENGKAPAN SURAT - KAPAL/MOTOR PEDALAMAN
2006**

**PERDA KAB. PONTIANAK NO.1, LD. 2006/NO. 1, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK : 12 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN KELENGKAPAN
SURAT-SURAT KAPAL/MOTOR PEDALAMAN DAN KAPAL LAUT ISI KOTOR DI BAWAH GT. 7.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka adanya tertib administrasi dan kepastian hukum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu adanya pengendalian terhadap keberadaan Kapal/Motor pedalaman dan legalisasi perubahan tanda di bawah GT.7.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi. Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan penutup.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2006;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada mengatur masalah yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - Penjelasan 1 hlm.

RETRIBUSI - IZIN USAHA – JASA KONSTRUKSI

2006

**PERDA KAB. PONTIANAK NO.2, LD. 2006/NO. 2, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK : 11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan PAD dan memberikan kepastian hukum dan atau memudahkan pembinaan serta pengawasan kepada setiap orang dan atau badan yang melakukan Usaha Jasa Konstruksi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2005; KEPPRES No. 80 Tahun 2003; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Pemberian Izin, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi. Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2006;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada mengatur masalah yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - Penjelasan 1 him.

**PERUBAHAN KEDUA – RETRIBUSI – PELAYANAN PERSAMPAHAN
2006**

PERDA KAB. PONTIANAK NO.3, LD. 2006/NO. 3, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 4 HLM.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan biaya operasional pelayanan persampahan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pontianak di sector pelayanan persampahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 perlu diadakan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 6 Tahun 2000; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2006;
 - Penjelasan 1 hlm.

**PERUBAHAN- RETRIBUSI – ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2006**

PERDA KAB. PONTIANAK NO.4, LD. 2006/NO. 4, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.

ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu pengenaan tariff Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pada saat ini.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1954; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.31 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2005; KEPPRES No. 12 Tahun 1983; PERDAKAB. PONTIANAK No. 3 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Pasal 1 angka 13 dan angka 14, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8. Penyisipan Bab XIA dan Pasal 14a, dan pengenaan sanksi administrasi jika wajib retribusi tidak tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2006;
– Penjelasan 1 hlm.

**PERUBAHAN – RETRIBUSI – PELAYANAN JASA KEPELABUHAN
2006**

PERDA KAB. PONTIANAK NO.5, LD. 2006/NO. 5, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN.

- ABSTRAK** :
- Bahwa pelaksanaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 14 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.14 Tahun 2002, PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan penjelasan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8.

- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2006;
 - Penjelasan 2 hlm.

PEMBENTUKAN – KECAMATAN SADANIANG

2006

PERDA KAB. PONTIANAK NO.7, LD. 2006/NO. 7, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SADANIANG.

ABSTRAK : – Bahwa pembentukam Kecamatan Sadaniang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 129 Tahun 2000; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan kecamatan, Ibukota kecamatan dan batas wilayah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Oktober 2006;

– Penjelasan 2 hlm, lampiran 1 hlm.

PEMBENTUKAN – KECAMATAN – MEMPAWAH TIMUR

2006

**PERDA KAB. PONTIANAK NO.8, LD. 2006/NO. 8, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 4 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
MEMPAWAH TIMUR.**

- ABSTRAK** : – Bahwa pembentukan Kecamatan Mempawah Timur telah memnuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 129 Tahun 2000; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan kecamatan, Ibukota kecamatan dan batas wilayah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Catatan** : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Oktober 2006;
– Penjelasan 2 hlm, lampiran 1 hlm.